

BAB II

KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SECARA SOSIAL

POLITIK GENDER, DAN PROFESSIONAL

Setelah pada bab sebelumnya dipaparkan mengenai metode yang akan digunakan untuk memperoleh data serta teori dan konsep yang digunakan untuk mengolah data dari penelitian, pada bab ini akan dipaparkan mengenai kontekstualisasi komunikasi perempuan secara sosial, politik gender, dan profesional.

Perempuan, dapat memiliki banyak peran sekaligus di dalam kehidupannya. Dengan aneka peran yang dimiliki dalam kehidupannya, tentunya seorang perempuan dapat memiliki ragam cara dalam berkomunikasi menyesuaikan dengan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan sebelum berkomunikasi, semisalkan: kepada siapa ia berbicara, dalam situasi apa ia berbicara, peran apa yang ia miliki dalam kondisi tersebut, dan lain sebagainya. Secara khusus apabila membicarakan mengenai perempuan dengan jabatan pemimpin, tentu seharusnya ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis orang dalam berbagai macam topik.

Hal ini dikarenakan tidak mungkin suatu cara komunikasi seperti, nada bicara, pilihan kata, atau bahkan bahasa tubuh yang digunakan dalam satu konteks komunikasi digunakan pada konteks yang berbeda dengan orang yang berbeda pula. Misalnya saja, pilihan kata serta nada bicara yang digunakan oleh perempuan dalam memimpin rapat agar rapat bisa berjalan lancar, belum tentu cocok digunakan untuk berkomunikasi dengan pasangan.

Sebagai seorang pemimpin, tentu ada tuntutan atau harapan untuk berkomunikasi secara tegas dan lugas kepada anggota dari organisasi atau kelompok yang dipimpinnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pemimpin yang baik umumnya juga merupakan seorang komunikator yang baik. Dalam berkomunikasi dengan anggotanya, pemimpin diharapkan untuk menjadi komunikator yang spesifik, atau mampu berkomunikasi tanpa terlalu lama bertele-tele dan langsung menyampaikan poin utama dari pembicaraan, pemimpin juga diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan cara yang terstruktur dan memberikan action plan atau perintah yang jelas kepada anggota dari kelompok atau organisasi yang ia pimpin (Myatt, 10 September, 2021).

Namun, tentu cara-cara berkomunikasi di atas umumnya hanya cocok diterapkan dalam konteks komunikasi sebagai seorang pemimpin. Cerita yang berbeda akan muncul jika kita berbicara mengenai cara berkomunikasi perempuan kepada pasangan. Sebagai perempuan, dalam berkomunikasi dengan pasangan terkadang masih terdapat norma-norma sosial atau cara-cara yang dipercaya oleh masyarakat mengenai bagaimana seharusnya seorang perempuan dalam hubungan romantis heteroseksual berkomunikasi dengan pasangannya yang notabene merupakan laki-laki.

Salah satu contohnya dapat kita jumpai dalam artikel yang dimuat di kompas.com. Artikel yang berjudul “Begini Cara Berbicara dengan Pria” itu menjelaskan bahwa sebagai perempuan harus lebih bersabar dalam berkomunikasi dengan pasangannya, dikatakan hal ini karena seringkali laki-laki melihat perempuan sebagai sosok yang suka meributkan hal-hal sepele yang tidak penting

maka dari itu perempuan haruslah lebih bersabar, serta lebih baik berfokus untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dahulu, dan memberi contoh dengan perilaku daripada dengan menggunakan komunikasi verbal apabila hendak menasehati atau berkomentar mengenai perilaku yang ia tidak senangi dari pasangannya(Pratiwi H. , 10 September, 2021).

Melihat adanya perbedaan cara dalam berkomunikasi, bahkan perbedaan ekspektasi dari masyarakat yang diberikan kepada perempuan mengenai cara ia berkomunikasi dengan pasangan, maka pengalaman perempuan dengan jabatan pemimpin dalam proses pengambilan keputusan pada hubungan romantisnya merupakan pengalaman yang perlu untuk di dengarkan agar kita dapat melihat bagaimana seorang perempuan berkomunikasi dengan pasangannya terutama dalam proses pengambilan keputusan ketika ia merupakan sosok pemimpin yang tentunya telah terbiasa dengan cara berkomunikasi yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan cara berkomunikasi dengan pasangan yang umumnya dipercaya oleh masyarakat.

2.1 Kepemimpinan Perempuan secara Sosial

Jumlah perempuan yang memegang jabatan pemimpin di Indonesia masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun dalam beberapa tahun ini terdapat peningkatan dari jumlah pemimpin perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beragam alasan struktural yang menghambat perempuan-perempuan di Indonesia untuk menduduki posisi pemimpin, diantaranya : masih terdapat anggapan bahwa perempuan bukanlah

pemimpin yang tepat, hal ini karena masih ada kepercayaan yang kuat bahwa perempuan adalah sosok yang emosional, tidak logis, dan kurang agresif untuk menjadi pemimpin. Hal ini juga terjadi karena masih adanya anggapan bahwa perempuan yang menduduki posisi pemimpin nantinya akan menjadi ‘ancaman’ bagi pihak laki-laki, terdapat stigma bahwa perempuan yang menjadi pemimpin adalah mereka yang kelak akan menjadi pengatur, tidak mau mendengarkan pasangannya, dominan, dan lain sejenisnya, hal ini menjadi penghambat karena tidak dapat dipungkiri masih kental adanya unsur-unsur patriarki yang cenderung lebih mendukung sifat-sifat perempuan menjadi *submissive* atau penurut, tidak suka membantah, dan mengikuti laki-laki, perempuan-perempuan seperti inilah yang dianggap sebagai sosok perempuan ‘ideal’ di mata masyarakat.

Tidak berhenti sampai disitu, sekalipun seorang perempuan telah menjadi pemimpin di ranah publik, bukan berarti tekanan atau ekspektasi sosial yang diberikan masyarakat kepadanya akan berubah. Tidak jarang sekalipun seorang perempuan telah menjadi pemimpin, namun yang menjadi pusat perhatian oleh orang-orang tidak hanya kepada kinerjanya sebagai pemimpin, tetapi juga atribut-atribut lain seperti atribut fisik, hubungannya dengan laki-laki di sekelilingnya, perangai atau sikap yang ia tampilkan sehari-hari di luar kepemimpinannya tetap dijadikan sorotan dan dikaitkan dengan jabatan pemimpin yang ia miliki (Andajani & Hadiwirawan, Olivia & Sokang 2016: 101).

Tidak jarang perempuan-perempuan di Indonesia sendirilah yang secara aktif membatasi dirinya untuk tidak menjadi terlalu ambisius di bidang karier, apalagi menduduki jabatan pemimpin. Dengan masih kentalnya kultur budaya di Indonesia

yang cenderung bersifat paternalistik , *stereotype* yang ada membuat perempuan ragu-ragu untuk terus melakukan pekerjaan di luar rumah, apalagi jika ia telah memiliki rencana untuk menikah dan memiliki anak (Anggahegari P. & Lantu D.C. 2014 : 235). Perempuan-perempuan yang memiliki keinginan untuk berumah tangga dan memiliki anak cenderung ragu untuk berkompetisi di dunia karier dan mengincar jabatan pemimpin karena masih adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk perempuan tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaan domestiknya seperti mengurus dan membesarkan anak, mempersiapkan makanan, mencuci baju dan sejenisnya, yang dibarengi dengan tuntutan yang tinggi pula di pekerjaan sebagai pemimpin untuk tetap lugas dan aktif dalam menjalankan pekerjaannya. Melihat jumlah pekerjaan yang justru terkesan bertambah secara drastis sebagai istri, ibu, dan juga seorang pemimpin akhirnya banyak perempuan-perempuan Indonesia yang memilih untuk melakukan pekerjaan dari rumah ataupun tidak begitu ambisius dalam mengejar kariernya.

Padahal sebenarnya, kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan dapat memberikan pengaruh baik kepada lingkungan maupun secara macro, kepada negaranya. Berdasarkan data dari McKinsey & Co, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan GDP hingga menyentuh angka 135 juta dollar di tahun 2025, berdasarkan studi yang dilakukan oleh MSCI World Index juga dikatakan bahwa keberadaan perempuan pada posisi kepemimpinan cenderung membawa dampak positif bagi perusahaan, kepemimpinan wanita yang kuat dapat mendorong laba hingga menyentuh angka 10.1 % yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan tempat atau perusahaan yang

tidak memiliki pemimpin perempuan, umumnya hanya bisa memperoleh laba sebesar 7.4% (Mustikasari, 19 Oktober, 2021). Dari data tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan perempuan membawa dampak yang positif bagi organisasi ataupun perusahaan yang dipimpinnya, dan dengan rendahnya angka kepemimpinan perempuan maka hal tersebut juga mengurangi manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut.

Apabila seorang perempuan menjadi pemimpin tentu kemampuan berkomunikasi dan analisis yang dimilikinya dalam mengambil suatu keputusan tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sebagai pengambilan keputusan tertinggi di perusahaan sudah sewajarnya seorang perempuan yang menjadi pemimpin memiliki kemampuan analisis, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Namun kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para pemimpin perempuan tersebut belum tentu akan dihargai atau akan di praktikkan dalam konteks komunikasi yang berbeda. Pada proses pengambilan keputusan dalam hubungan romantis misalnya, terkadang terlepas dari fakta bahwa perempuan adalah seorang pemimpin, dalam proses pengambilan keputusan di hubungan romantis laki-laki tetap menjadi pengambil keputusan yang lebih dominan.

Hal ini dapat terjadi lagi-lagi tidak terlepas dari ekspektasi sosial yang terus dipopulerkan oleh masyarakat bahwa setinggi apapun posisi seorang perempuan di ranah publik, di ranah privat, ia tetap harus menjadi subordinat dari pasangannya, bahwa laki-laki yang harus menjadi figur pemimpin dalam suatu hubungan. Pada proses *initiate dating*, atau proses pengambilan keputusan untuk menjalin hubungan romantis misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus lebih agresif dan memulai

terlebih dahulu untuk menyatakan perasaan serta menginisiasi pembentukan hubungan romantis dan perempuan seharusnya bersikap lebih 'jual mahal' dan pasif merupakan anggapan yang sangat populer baik di negara-negara Asia maupun negara-negara barat (Ömür, M., & Büyükşahin-Sunal, A. 2015 : 196).

2.2 Kepemimpinan Perempuan secara Politik Gender

Posisi kepemimpinan perempuan tentunya akan dipengaruhi juga oleh aktivitas politik yang tengah terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, kebijakan, peraturan perundangan, hingga implementasi dari hukum dan politik yang tentunya dirasakan dampaknya oleh para pemimpin perempuan, akan dibuat oleh mereka yang tengah duduk di tampuk kepemimpinan. Politik akan berpengaruh karena kebijakan, peraturan, perundangan, bahkan gaya kepemimpinan pemerintah suatu negara cenderung memberikan dampak pada banyak aspek dalam kehidupan perempuan, mulai dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Iklim politik dan pemerintahan juga penting untuk diperhatikan karena pada akhirnya sikap pemimpin terhadap perempuan, kampanye-kampanye partai politik yang dilakukan juga akan memberikan dampak kepada perempuan. Narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pemimpin serta partai politik umumnya akan diserap oleh masyarakat luas dan pada akhirnya turut mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-harinya. Perlakuan masyarakat ini kemudian akan diterima oleh perempuan-perempuan yang ada di tengah masyarakat dan tentunya akan mempengaruhi pertimbangan seorang perempuan, terlebih perempuan dalam posisi pemimpin.

Apabila perempuan-perempuan dalam posisi kepemimpinan ini menerima banyak perlakuan tidak menyenangkan atau reaksi yang cenderung negatif,

tentunya hal ini akan memberikan dampak berupa tumbuhnya kesulitan yang harus dihadapi oleh para pemimpin perempuan ini dalam mengambil keputusan maupun memimpin organisasi atau kelompoknya, tidak menutup kemungkinan juga reaksi negatif dari masyarakat dapat menimbulkan stigma yang cenderung negatif terhadap pemimpin-pemimpin perempuan. Stigma negatif yang melekat pada pemimpin-pemimpin perempuan ini, misalkan dianggap sebagai perempuan yang gemar membangkang, tidak bisa diajak berkompromi, terlalu dominan dan lain sebagainya bukan tidak mungkin akan memberikan dampak pada kehidupan pribadi dari pemimpin-pemimpin perempuan ini.

Pemberdayaan perempuan terutama termasuk di dalamnya kepemimpinan perempuan telah diangkat sebagai salah satu isu pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Sesi III KTT G20 Osaka dengan tema *Addressing Inequalities & Realizing an Inclusive and Sustainable World*, Sabtu, 29 Juni 2019 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa akses baik untuk pendidikan maupun pemberdayaan perempuan elemen penting untuk mencapai target dari *sustainable development goals*. Presiden Jokowi menambahkan bahwa ada banyak karakteristik yang cenderung lebih menonjol dalam diri perempuan yang sebenarnya penting untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing nasional di era digital, hal-hal tersebut diantaranya adalah perempuan dikatakan sebagai sosok yang lebih rajin, lebih tekun, lebih detail, lebih sabar, dan memiliki kemampuan bekerja sama yang lebih baik (Kemlu, 16 November, 2021).

Secara peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah pengambilan keputusan di ranah publik terutama melalui

pemerintahan sebenarnya telah terdapat Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU No. 2/2011 tentang Perubahan UU No. 2/2008 tentang Partai Politik yang telah mengamanatkan untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen. Akan tetapi, hingga saat ini kuota tersebut masih belum tercapai (Kemenkopmk, 16 November, 2021).

Berdasarkan dua pemaparan contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa wacana untuk peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kepemimpinan, dan juga utamanya kepemimpinan telah terlihat pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, namun wacana tersebut pada akhirnya belum sepenuhnya terwujud dan membuahkan hasil.

Wacana yang belum berjalan secara sempurna ini juga terancam terhambat dengan meningkatnya konservatisme islam pada iklim politik di Indonesia. Walaupun pada dasarnya Indonesia adalah negara demokratis yang tidak menjadikan agama tertentu sebagai fondasi utama dalam menjalankan politik pemerintahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran narasi-narasi agama, penyerangan yang dilakukan kepada kandidat eksekutif atas nama agama, serta dimasukkannya hukum-hukum syariah ke peraturan daerah adalah hal yang lazim dilakukan di Indonesia akhir-akhir ini (Fanani, 29 November, 2021). Hal ini dilakukan tidak lain untuk menarik perhatian dari masyarakat muslim yang merupakan suara mayoritas di Indonesia. Dengan menarik simpati dari mayoritas, politikus ataupun partai politik dapat dengan mudah mendulang suara pada pemilihan pemerintah daerah maupun pemilihan pemerintah pusat.

Narasi-narasi agama yang terus diperkuat pada ranah politik di Indonesia yang umumnya masih didominasi oleh laki-laki, akhirnya turut mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pemimpin perempuan di Indonesia. Padahal, tidak jarang bahwa narasi-narasi agama tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang sulit untuk menjadi pemimpin. Akhirnya walaupun secara peraturan perundang-undangan yang mendukung kepemimpinan perempuan seperti misalnya kewajiban bagi partai politik untuk memenuhi kuota representasi perempuan, belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aspinall, Savirani, dan White pada tahun 2021, ditemukan fakta bahwa umumnya masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya percaya terhadap kepemimpinan perempuan, hal ini umumnya dilandaskan pada : kepercayaan yang tidak jauh dari pandangan agama bahwa laki-laki lah yang seharusnya menjadi pemimpin, laki-laki yang dipandang lebih kompeten untuk menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan di berbagai bidang seperti pada bidang pendidikan, lingkungan, politik luar negeri dan lain sebagainya, serta anggapan bahwa perempuan seharusnya lebih fokus kepada tugas-tugas domestik seperti menjadi ibu rumah tangga, menjaga anak, serta pandangan bahwa walaupun perempuan hendak menjadi pemimpin maka izin dari pasangannya tetaplah dipandang sebagai sesuatu yang penting. (Aspinall E, White S, Savirani A. 2021 : 4-10).

Dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk duduk di posisi pemimpin telah terlihat, namun masih kuatnya narasi-narasi agama yang terus disebarkan juga tidak hanya dalam kehidupan

sehari-hari namun oleh partai-partai politik dan politikus ternyata turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam posisi pemimpin serta perempuan yang aktif terlibat dalam pemerintahan. Persepsi masyarakat Indonesia terhadap pemimpin-pemimpin perempuan Indonesia juga belum dapat dikatakan sepenuhnya positif atau mendukung baik mereka yang telah duduk di posisi kepemimpinan maupun mereka yang hendak menduduki posisi pemimpin.

2.3 Komunikasi Kepemimpinan Perempuan secara Profesional.

Proses pengambilan dapat menjadi panjang karena seringkali terjadi perbedaan cara pendekatan terhadap suatu masalah atau kondisi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Pada umumnya, laki-laki cenderung bersikap *solution oriented* atau berfokus kepada solusi dan berusaha untuk mencapai solusi atau suatu keputusan secepat mungkin. Sementara perempuan seringkali ingin mengeksplorasi dan menelaah kondisi terlebih dahulu, dan tidak terburu-buru untuk mencapai keputusan. Pada akhirnya terkadang terjadi miskomunikasi dimana pihak laki-laki merasa perempuan terlalu bertele-tele dalam mengambil keputusan karena membahas terlalu banyak aspek pada suatu isu atau masalah, sementara pihak perempuan merasa tidak didengarkan karena pihak laki-laki tampak ingin segera mengambil keputusan (Heltler, 10 oktober, 2021)

Padahal sebenarnya, proses dalam pengambilan keputusan, sekalipun proses tersebut memakan waktu yang panjang, dapat memberikan dampak positif bagi hubungan romantis karena dengan adanya persoalan yang perlu dipecahkan bersama-sama maka akan terbangun komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak, kooperasi pun akan semakin terbangun, dan mau tidak mau pasangan akan

lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Sehingga pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa apabila dilakukan dengan penuh perhatian kepada satu sama lain, proses pengambilan keputusan ini sebenarnya dapat meningkatkan kedekatan dalam hubungan romantis dan bahkan meningkatkan kepuasan kedua belah pihak dalam hubungan romantis tersebut (Wijaya & Widyaningsih 2021 : 4-5). Dapat disimpulkan bahwa walaupun mungkin memakan waktu lama, namun pengambilan keputusan yang secara aktif melibatkan kedua belah pihak tidak hanya berkemungkinan menghasilkan keputusan yang baik, namun juga meningkatkan kepuasan dalam hubungan romantis.

Salah satu contoh kasus mengenai bagaimana perempuan yang menjadi pemimpin memperoleh stigma negatif dari masyarakat, dapat kita lihat dari Ketua Bem UPI Periode 2020 Fatiha Elfahmi. Terdapat 4 kandidat yang mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa pada periode pemilihan tahun 2020. Fatiha Elfahmi adalah satu-satunya kandidat perempuan. Ketika akhirnya Fatiha Elfahmi atau yang biasa dipanggil Elfa terpilih menjadi ketua BEM Elfa mencatatkan diri sebagai presiden pertama sepanjang 70 tahun UPI berdiri. Dalam perjalanannya menuju jabatan pemimpin sebagai ketua BEM, Elfa harus menerima kampanye hitam yang ditujukan tidak lain kepada dirinya dan mempermasalahkan statusnya sebagai seorang perempuan.

Pada masa kampanye, terdapat sebuah video mengenai seorang ustadz yang mengemukakan larangan perempuan menjadi pemimpin tersebar di kalangan mahasiswa UPI, tidak hanya itu sebuah akun instagram dengan username @info_upi juga mengunggah konten yang cenderung mendiskreditkan

kepemimpinan perempuan. Unggahan tersebut berupa sebuah video yang di dalamnya dikatakan bahwa : “Jaman perempuan jadi presiden aja banyak aset yang dijual. Kalo kejadian lagi gimana? Mau jual idealisme mahasiswa?” (Tuasikal, 30 November, 2021). Walaupun menerima kampanye hitam, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Elfa, hingga akhirnya terlepas dari kecaman yang ia terima, Elfa berhasil menjadi ketua BEM UPI untuk periode 2020.

